Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian
E-ISSN: 2580-538X, Volume 12, No. 2, Oktober 2026, hlm. 167-188

Praktik keterbukaan informasi pertahanan dan pengelolaan keamanan informasi nasional melalui instagram @Kemhanri

Wianda Tika*, Alfi Rahmawati
Program Studi Komunikasi Digital dan Media, IPB University, Bogor, Indonesia
*Email Korespondensi : tikawianda@apps.ipb.ac.id

Diterima: 12 Juni 2026; Direvisi: 22 Oktober 2026; Terbit: 30 Oktober 2026

Abstract

The rapid growth of social media has encouraged government institutions to utilize digital platforms as channels for public communication, including in the defense sector, which is characterized by strategic and sensitive information. While the public increasingly demands transparency, defense institutions are simultaneously required to safeguard information related to national interests and security. This study aims to analyze the practice of defense information disclosure and national information security management through the Ministry of Defense's Instagram account, @kemhanri, as part of its Strategic Communication efforts. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, participant observation conducted during an internship at the Defense Information Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense, and a literature review. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model through the lens of Strategic Communication theory. The findings reveal that the Ministry of Defense implements selective and controlled information disclosure through information classification, message simplification, the use of visual communication formats, and the management of sensitive issues to minimize the risks of misinformation and disinformation. Beyond serving as a public communication platform, Instagram @kemhanri functions as a strategic instrument for strengthening institutional legitimacy, enhancing public trust, and reinforcing national information resilience. This study contributes to the development of Strategic Communication scholarship in the defense sector by demonstrating that transparency and information security can be managed simultaneously through adaptive, audience-centered digital communication strategies.

Keywords: *Information disclosure; ministry of defense; national information resilience; public communication; strategic communication.*

Abstrak

Perkembangan media sosial telah mendorong institusi pemerintah untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana komunikasi publik, termasuk pada sektor pertahanan yang memiliki karakteristik informasi strategis dan sensitif. Di satu sisi, masyarakat menuntut keterbukaan informasi, sementara di sisi lain institusi pertahanan harus menjaga keamanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik keterbukaan informasi pertahanan dan pengelolaan keamanan informasi nasional melalui akun Instagram @kemhanri sebagai bagian dari komunikasi strategis Kementerian Pertahanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi selama kegiatan magang di Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, serta studi literatur. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan perspektif *Strategic Communication*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Pertahanan menerapkan keterbukaan informasi secara selektif dan terkendali melalui proses klasifikasi informasi, penyederhanaan bahasa, pemanfaatan format visual, serta pengelolaan isu sensitif guna meminimalkan risiko misinformasi dan disinformasi. Selain berfungsi sebagai media komunikasi publik, Instagram @kemhanri juga menjadi instrumen strategis untuk membangun legitimasi institusi, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat ketahanan informasi nasional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian *Strategic Communication* pada sektor pertahanan dengan menunjukkan bahwa transparansi dan keamanan informasi dapat dikelola secara simultan melalui strategi komunikasi digital yang adaptif dan berorientasi pada audiens.

Kata-kata kunci: Kementerian Pertahanan; Ketahanan informasi nasional; Keterbukaan informasi; Komunikasi publik; Komunikasi strategis

Pendahuluan

Media sosial telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat secara cepat dan luas. Kehadiran media sosial telah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan, kritik, dan pandangan yang dapat berkontribusi terhadap pembentukan persepsi publik serta diskursus kebijakan (Zordi *et al*., 2026). Kondisi tersebut mendorong institusi pemerintah untuk menyesuaikan pola komunikasinya agar lebih partisipatif dan komunikatif di ruang digital. Komunikasi publik dalam konteks pemerintahan berperan untuk menyampaikan informasi dan pesan strategis yang bertujuan untuk membangun pemahaman, kepercayaan, serta partisipasi masyarakat terhadap isu kepentingan nasional (Hariadi et al., 2025).

Instagram menjadi salah satu media sosial yang memiliki tingkat keterlibatan pengguna yang tinggi terhadap konten visual dan interaktif (Damiana, 2025). Keunggulan ini menjadikan Instagram sebagai kanal strategis bagi lembaga pemerintah, termasuk akun @kemhanri milik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dalam menyampaikan informasi kebijakan, aktivitas institusi, serta isu pertahanan kepada masyarakat luas. Pemanfaatan Instagram tidak hanya bertujuan untuk menyebarkan informasi resmi, tetapi juga untuk membangun pemahaman publik mengenai peran pertahanan negara di era digital. Namun, penggunaan media sosial pada sektor pertahanan memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan sektor pemerintahan lainnya.

Komunikasi di sektor pertahanan berkaitan langsung dengan keamanan nasional, stabilitas negara, serta pengelolaan informasi strategis yang tidak seluruhnya dapat diakses secara terbuka oleh publik (Saputro & Satriya, 2023). Di sisi lain, perkembangan media sosial membuat arus informasi berlangsung sangat cepat dan sulit dikendalikan sehingga dapat meningkatkan risiko misinformasi, disinformasi, kesalahan interpretasi publik, hingga terbentuknya narasi yang dapat memengaruhi legitimasi institusi pertahanan negara (Sarjito, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang komunikasi publik, tetapi juga menjadi arena pertahanan informasi (*information domain*) yang berkaitan terhadap keamanan nasional.

Perkembangan ruang digital tersebut juga menyebabkan batas antara ruang komunikasi domestik dan global menjadi semakin kabur. Informasi yang dipublikasikan melalui media sosial dapat dengan mudah diakses, direproduksi, dan disebarluaskan oleh berbagai pihak dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini menuntut institusi pertahanan untuk

memiliki strategi komunikasi yang mampu mengantisipasi berbagai konsekuensi dari penyebaran informasi di ruang digital. Namun, komunikasi di bidang pertahanan juga harus mempertimbangkan aspek keamanan informasi, pengelolaan persepsi publik, serta potensi dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan strategis negara.

Ancaman terhadap negara saat ini tidak lagi terbatas pada ancaman militer konvensional, tetapi juga mencakup ancaman nonmiliter seperti perang informasi (*information warfare*), manipulasi opini publik, disinformasi digital, dan gangguan terhadap stabilitas persepsi masyarakat terhadap institusi negara (Harsandy, 2025). Situasi tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi pertahanan menjadi bagian penting untuk menjaga ketahanan nasional di ruang digital melalui pengelolaan pesan, pengendalian persepsi publik, serta pengamanan informasi strategis negara.

Kementerian Pertahanan sebagai institusi yang mengelola isu strategis pertahanan, menerapkan prinsip keterbukaan yang terkendali sebagai bentuk keseimbangan antara hak publik untuk memperoleh informasi dan kewajiban negara dalam menjaga keamanan nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik keterbukaan informasi di bidang pertahanan tidak hanya berkaitan dengan transparansi publik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengelolaan keamanan informasi negara dan komunikasi pertahanan di ruang digital (Sarjito, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi instrumen penting dalam komunikasi publik pemerintah karena dinilai mampu untuk meningkatkan keterbukaan informasi, memperluas jangkauan penyebaran pesan, membangun kepercayaan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses komunikasi pemerintahan. Menurut sebuah penelitian, media sosial berperan sebagai sarana komunikasi yang efektif untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyampaian informasi yang cepat, interaktif, dan dialogis (Umma & Ahmad, 2025). Di sisi lain, sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi informasi publik turut menghadirkan tantangan baru berupa disinformasi, ancaman siber, dan risiko penyalahgunaan informasi yang menuntut adanya pengelolaan keamanan informasi yang memadai (Habibie et al., 2025). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan keamanan informasi merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam praktik komunikasi publik di era digital.

Sementara itu, dalam konteks pertahanan, penelitian yang telah dilakukan masih cenderung membahas komunikasi publik, keamanan informasi, dan pertahanan nasional

secara terpisah. Sebuah penelitian lebih berfokus pada komunikasi sosial pertahanan sebagai sarana pemberdayaan wilayah pertahanan dan penguatan hubungan antara TNI dengan masyarakat (Wibowo et al., 2023). Penelitian lain menempatkan media sosial sebagai salah satu tantangan terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan nasional akibat meningkatnya penyebaran informasi yang sulit dikendalikan di ruang digital (Prasetyo, 2024). Meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara komunikasi, media sosial, dan pertahanan negara, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menjelaskan bagaimana praktik keterbukaan informasi pertahanan dilaksanakan melalui media sosial pemerintah serta bagaimana proses pengelolaan keamanan informasi dilakukan dalam aktivitas komunikasi publik yang bersifat terbuka.

Kesenjangan penelitian juga terlihat dari minimnya kajian yang menjadikan media sosial lembaga pertahanan sebagai unit analisis utama. Sebagian besar penelitian mengenai komunikasi publik pemerintah masih berfokus pada efektivitas media sosial sebagai sarana diseminasi informasi, peningkatan partisipasi publik, atau pembentukan citra institusi. Padahal, institusi pertahanan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan lembaga pemerintah lainnya karena berhadapan dengan informasi yang bersifat lebih strategis, sensitif, dan berkaitan langsung dengan kepentingan keamanan nasional.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat karena media sosial pemerintah saat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi informasi, tetapi juga menjadi ruang kompetisi narasi yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi negara. Persepsi publik dalam konteks pertahanan memiliki peran penting karena berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan, program, dan aktivitas pertahanan yang dilakukan pemerintah. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang mendukung efektivitas komunikasi pertahanan sekaligus memperkuat legitimasi institusi dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, kajian mengenai keterbukaan informasi pada sektor pertahanan masih relatif terbatas dibandingkan penelitian pada sektor pemerintahan lainnya. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas implementasi keterbukaan informasi publik pada lembaga pelayanan publik, pemerintahan daerah, atau institusi politik. Padahal, sektor pertahanan memiliki karakteristik yang unik karena harus menyeimbangkan tuntutan transparansi dengan kebutuhan menjaga kerahasiaan informasi tertentu yang berkaitan dengan keamanan nasional. Kondisi tersebut menjadikan praktik komunikasi publik pada sektor pertahanan menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana institusi negara mengelola dua kepentingan yang berjalan secara bersamaan, yaitu memenuhi hak masyarakat

untuk memperoleh informasi dan melindungi informasi strategis yang tidak dapat dipublikasikan secara terbuka.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik keterbukaan informasi dilakukan oleh Kementerian Pertahanan melalui akun Instagram @kemhanri sebagai bentuk komunikasi strategis pertahanan dalam menjaga ketahanan nasional di ruang digital. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan bagaimana pengelolaan pesan pertahanan dilakukan agar informasi dapat diterima oleh publik tanpa mengurangi substansi strategis dan aspek keamanan negara.

Penelitian ini menggunakan perspektif *Strategic Communication* untuk melihat bagaimana akun Instagram @kemhanri mengelola pesan pertahanan, membangun legitimasi institusi, serta menjaga stabilitas informasi publik terkait isu pertahanan negara. Selain itu, penelitian ini dikaitkan dengan konsep ketahanan informasi nasional yang menekankan pentingnya kemampuan negara dalam mengelola arus informasi dan menghadapi ancaman disinformasi di era digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami praktik komunikasi publik Kementerian Pertahanan melalui media sosial Instagram @kemhanri. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman yang mendalam mengenai proses pengelolaan informasi publik dan strategi komunikasi yang diterapkan dalam ruang digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana Kementerian Pertahanan mengelola keterbukaan informasi sekaligus menjaga keamanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan negara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan Kepala Subbagian Opini pada Bagian Media Sosial dan Kepala Subbagian Pelayanan Informasi Publik Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan sebagai informan utama. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* karena informan memiliki posisi strategis yang terlibat langsung dalam pengelolaan komunikasi publik dan media sosial Kementerian Pertahanan sehingga memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai proses produksi konten, penyusunan pesan, pengelolaan isu sensitif, serta strategi komunikasi yang diterapkan dalam penyampaian informasi pertahanan kepada masyarakat. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses penyampaian informasi kepada publik, pengelolaan isu sensitif, strategi penyusunan pesan, serta tantangan komunikasi publik terkait isu-isu pertahanan di media sosial, khususnya Instagram.

Observasi dilakukan secara langsung selama pelaksanaan magang di Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan selama tiga bulan. Observasi digunakan untuk mengamati praktik komunikasi publik yang dilakukan institusi dalam pengelolaan media sosial, proses produksi konten, pengemasan informasi, mekanisme seleksi informasi yang dipublikasikan, serta interaksi komunikasi digital melalui Instagram @kemhanri. Observasi langsung dalam jangka waktu tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai proses pengelolaan komunikasi publik pemerintah di bidang pertahanan dalam ruang digital.

Penelitian ini juga menggunakan studi literatur sebagai pendukung data penelitian. Studi literatur dilakukan melalui pengkajian jurnal ilmiah, buku, regulasi, dokumen resmi Kementerian Pertahanan, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah, komunikasi strategis, media sosial pemerintah, keamanan informasi, dan ketahanan informasi nasional. Studi literatur digunakan untuk memperkuat analisis hasil penelitian serta membandingkan temuan lapangan dengan konsep dan penelitian sebelumnya.

Teknik triangulasi juga dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hasil observasi lapangan serta dokumen dan literatur yang relevan (Aisy & Christin, 2025). Sementara itu, triangulasi metode dilakukan melalui penggunaan berbagai teknik pengumpulan data secara bersamaan, yaitu wawancara, observasi, dan studi literatur, sehingga informasi yang diperoleh dapat saling melengkapi dan memverifikasi satu sama lain. Penerapan triangulasi bertujuan untuk memastikan konsistensi data, meningkatkan validitas temuan penelitian, serta meminimalkan potensi bias dalam proses interpretasi data.

Penelitian ini menggunakan teori *Strategic Communication* sebagai pisau analisis untuk memahami praktik komunikasi publik yang dilakukan Kementerian Pertahanan melalui Instagram @kemhanri. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Kementerian Pertahanan mengelola keterbukaan informasi, menyusun pesan yang sesuai dengan karakteristik media sosial, serta menjaga keseimbangan antara transparansi informasi publik dan perlindungan terhadap informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dilakukan melalui tiga tahapan tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Ash-shiddiqi *et al*., 2025). Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi literatur dianalisis secara interpretatif dengan menggunakan perspektif *Strategic Communication*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Strategis Pertahanan

Praktik keterbukaan informasi pada Instagram @kemhanri menunjukkan bahwa komunikasi publik Kementerian Pertahanan dilakukan secara selektif dan terkendali dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan nasional. Informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat merupakan informasi yang telah melalui proses pertimbangan institusional terkait klasifikasi informasi dan potensi dampaknya terhadap kepentingan strategis negara. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi pada sektor pertahanan tidak dimaknai sebagai keterbukaan informasi secara penuh, melainkan sebagai keterbukaan yang disesuaikan dengan karakteristik sektor pertahanan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan nasional. Praktik tersebut dilakukan karena institusi pertahanan menghadapi dua tuntutan yang berjalan secara bersamaan, yaitu memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus melindungi informasi yang berpotensi memengaruhi keamanan negara apabila dipublikasikan secara luas.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa Instagram tidak hanya digunakan sebagai sarana diseminasi informasi, tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan hubungan antara institusi dan publik. Komunikasi publik pemerintah pada sektor pertahanan tidak hanya berorientasi pada kuantitas informasi yang dipublikasikan, melainkan pada kemampuan institusi dalam menyediakan informasi yang dapat dipahami masyarakat dan tetap sesuai dengan kepentingan keamanan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi institusi pertahanan di ruang digital dibangun melalui kemampuan institusi dalam mengelola keseimbangan antara transparansi dan kerahasiaan informasi.

Kondisi tersebut sejalan dengan perspektif *Strategic Communication* yang memandang komunikasi sebagai proses yang dirancang secara terencana untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan pesan, pemilihan media, dan pengelolaan hubungan dengan audiens (Estaswara, 2021). Komunikasi dalam perspektif ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membentuk pemahaman, membangun legitimasi, dan mengelola persepsi publik terhadap organisasi (Miliani *et al*., 2025). Selektivitas informasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan menunjukkan adanya pengelolaan pesan yang disesuaikan dengan tujuan institusi, yaitu memenuhi kebutuhan informasi publik tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional. Temuan ini memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi pada Instagram @kemhanri merupakan bagian dari strategi komunikasi yang

dirancang untuk menjaga keseimbangan antara transparansi publik, legitimasi institusi, dan perlindungan terhadap kepentingan strategis negara.

Praktik keterbukaan informasi yang selektif tersebut juga memiliki implikasi terhadap ketahanan informasi nasional. Penyampaian informasi melalui kanal resmi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang kredibel dan terverifikasi sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber informasi yang belum tentu akurat. Keberadaan sumber informasi resmi dalam ruang digital yang rentan terhadap penyebaran hoaks dan disinformasi menjadi penting untuk menjaga stabilitas informasi publik terkait isu pertahanan. Keterbukaan informasi yang terkelola secara strategis tidak hanya mendukung transparansi institusi, tetapi juga memperkuat ketahanan informasi nasional melalui penyediaan informasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Praktik keterbukaan informasi yang dilakukan Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa transparansi dalam sektor pertahanan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan lembaga publik lainnya. Keterbukaan informasi publik pada umumnya diarahkan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat (Ricky & Rahimallah, 2022). Namun dalam sektor pertahanan, keterbukaan informasi harus mempertimbangkan konsekuensi strategis yang dapat muncul apabila informasi tertentu dipublikasikan secara tidak terkendali. Oleh karena itu, transparansi tidak hanya dipahami sebagai penyediaan informasi, tetapi juga sebagai kemampuan institusi dalam menentukan informasi yang layak diketahui publik tanpa menimbulkan risiko terhadap kepentingan nasional.

Pengelolaan Pesan Pertahanan melalui Instagram @kemhanri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pesan pada Instagram @kemhanri dilakukan melalui penyederhanaan bahasa dan penyesuaian format komunikasi agar informasi pertahanan dapat dipahami oleh masyarakat umum. Praktik tersebut dilakukan karena isu pertahanan memiliki karakteristik yang lebih kompleks, teknis, dan sensitif sehingga dapat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila disampaikan menggunakan istilah yang terlalu formal atau teknis. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi publik tidak hanya ditentukan oleh tersampaikannya informasi kepada masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan publik dalam memahami dan memaknai informasi tersebut secara tepat. Penyederhanaan bahasa menjadi strategi komunikasi yang penting bagi Kementerian Pertahanan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan antara institusi dan masyarakat yang memiliki latar belakang pemahaman yang beragam mengenai isu pertahanan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi pertahanan tidak hanya berfungsi

sebagai proses penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses translasi pengetahuan. Informasi pertahanan pada umumnya disusun menggunakan terminologi teknis, regulatif, dan operasional yang tidak selalu mudah dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, institusi perlu menerjemahkan informasi tersebut ke dalam bahasa yang lebih komunikatif tanpa menghilangkan substansi utama yang ingin disampaikan. Dalam konteks ini, keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi juga oleh kemampuan institusi menjembatani perbedaan pengetahuan antara sumber informasi dan audiens. Proses translasi pengetahuan menjadi penting karena memungkinkan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai kebijakan, program, maupun isu pertahanan yang berkembang.

Penyederhanaan bahasa merupakan bentuk *audience-centered communication* dalam perspektif *Strategic Communication*, di mana pesan disesuaikan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan audiens agar tujuan komunikasi dapat tercapai secara lebih efektif (Fatima & Sa'i, 2025). Strategi tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Pertahanan mempertimbangkan keberagaman tingkat pengetahuan masyarakat dalam merancang pesan yang disampaikan melalui media sosial. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan institusi resmi, maka semakin kecil peluang terbentuknya persepsi yang keliru mengenai kebijakan dan isu pertahanan yang sedang berkembang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi publik juga menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan informasi nasional di era digital melalui pengurangan kerentanan publik terhadap informasi yang tidak terverifikasi.

Selain pengelolaan pesan, efektivitas komunikasi publik Kementerian Pertahanan juga didukung oleh karakteristik Instagram sebagai media berbasis visual. Platform ini memungkinkan penyampaian informasi pertahanan yang kompleks melalui format yang lebih sederhana dan mudah dipahami, seperti infografis, foto kegiatan, video singkat, *reels*, serta *carousel* yang memuat informasi secara bertahap. Pemanfaatan format visual tersebut membantu institusi menjelaskan isu pertahanan kepada masyarakat yang memiliki tingkat literasi informasi yang beragam.

Karakteristik Instagram yang menyediakan fitur komentar, *likes*, *shares*, dan *insights* juga memberikan peluang bagi Kementerian Pertahanan untuk memantau respons publik terhadap informasi yang dipublikasikan. Institutsi dapat mengidentifikasi isu yang memperoleh perhatian masyarakat, mengevaluasi efektivitas pesan yang disampaikan, serta menyesuaikan strategi komunikasi berdasarkan respons audiens melalui fitur tersebut. Temuan

ini memperlihatkan bahwa pemilihan Instagram sebagai media komunikasi bukan semata-mata karena popularitas platform tersebut, melainkan karena kemampuannya dalam mendukung penyampaian pesan pertahanan secara visual, interaktif, dan partisipatif.

Source: (Instagram kemhanri, 2026)
Gambar 1. Reels Kegiatan Bulan Mei

Penggunaan format visual dalam Instagram @kemhanri menunjukkan adanya transformasi pendekatan komunikasi pemerintah dari model birokratis menuju model yang lebih adaptif terhadap karakteristik audiens digital. Penyampaian informasi melalui infografis, video singkat, dan *carousel* memungkinkan isu pertahanan yang sebelumnya dianggap kompleks menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Kecendurangan kelompok usia muda yang terbiasa mengonsumsi informasi visual secara cepat menjadikan strategi ini penting untuk diterapkan. Dengan demikian, penggunaan format visual tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan daya tarik konten, tetapi juga menjadi strategi edukasi publik mengenai isu pertahanan negara.

Pengelolaan Isu Sensitif dan Keamanan Informasi Pertahanan

> *"Jika ada isu pertahanan yang mendesak untuk segera di klarifikasi, maka informasi tersebut disampaikan dengan tetap memperhatikan batas-batas informasi yang dikecualikan"* **(Kutipan wawancara, 11 Mei 2026)**

Informan menjelaskan bahwa pengelolaan isu sensitif dilakukan melalui pembatasan informasi tertentu sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan strategis negara dipublikasikan secara terbatas dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan potensi respons publik di media sosial. Praktik tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian dari arena pengelolaan informasi yang memiliki konsekuensi terhadap keamanan nasional. Pembatasan informasi dilakukan bukan untuk mengurangi transparansi institusi, tetapi untuk mencegah penyalahgunaan informasi

yang dapat menimbulkan ancaman terhadap pertahanan negara.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa komunikasi publik di lingkungan Kementerian Pertahanan telah menjadi bagian dari mekanisme organisasi yang terstruktur. Informasi yang dipublikasikan tidak muncul sebagai keputusan individual pengelola media sosial, melainkan merupakan hasil koordinasi yang melibatkan prosedur, kewenangan, dan pertimbangan kelembagaan. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan komunikasi publik pada sektor pertahanan telah mengalami proses institusionalisasi, yaitu menjadikan komunikasi sebagai fungsi organisasi yang terintegrasi dengan proses kerja institusi. Kondisi ini penting karena konsistensi komunikasi publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas pesan, tetapi juga oleh keberadaan tata kelola yang mampu menjamin akurasi, akuntabilitas, dan kesinambungan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Temuan ini memperlihatkan bahwa komunikasi publik pada sektor pertahanan memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar penyampaian informasi. Komunikasi publik juga berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko informasi. Sarjito (2024) menjelaskan bahwa perkembangan media digital meningkatkan potensi penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat memengaruhi stabilitas nasional. Pengendalian informasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dalam konteks tersebut, dapat dipahami sebagai bagian dari strategi untuk meminimalkan risiko disinformasi dan menjaga stabilitas informasi publik terkait isu pertahanan.

Konsekuensi yang lebih luas dari praktik tersebut adalah penguatan ketahanan informasi nasional melalui perlindungan terhadap informasi strategis yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kerentanan tidak hanya muncul akibat kebocoran informasi dalam konteks ancaman informasi digital, tetapi juga dari penyalahgunaan informasi yang dapat dimanipulasi untuk membentuk opini publik yang merugikan kepentingan negara (Faraby, 2024). Oleh karena itu, pembatasan informasi sensitif dapat dipahami sebagai bentuk mitigasi risiko informasi yang bertujuan menjaga stabilitas informasi sekaligus melindungi kepentingan pertahanan nasional. Praktik ini menunjukkan bahwa komunikasi publik pada sektor pertahanan tidak hanya berorientasi pada keterbukaan informasi, tetapi juga pada pengamanan informasi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional.

Interaksi Publik dan Implikasinya terhadap Ketahanan Informasi Nasional

> *"Respons masyarakat tentunya sangat penting bagi kami, jika dilihat dari interaksi dikolom komentar, semua kritik dan saran yang diberikan menjadi bahan evaluasi bagi*

kami" **(Kutipan wawancara, 11 Mei 2026).**

Berdasarkan hasil wawancara, informan juga menjelaskan bahwa respons masyarakat pada kolom komentar menjadi bahan evaluasi bagi tim Humas dalam menentukan strategi komunikasi selanjutnya. Interaksi dengan publik dalam perspektif *Strategic Communication* merupakan bagian dari pengelolaan hubungan antara institusi dan audiens yang bertujuan untuk membangun kepercayaan, legitimasi, dan dukungan publik terhadap organisasi. Respons masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai umpan balik terhadap pesan yang disampaikan, tetapi juga menjadi sumber informasi bagi Kementerian Pertahanan untuk memahami kebutuhan, persepsi, dan tingkat pemahaman publik terhadap isu pertahanan. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi publik melalui Instagram @kemhanri tidak hanya berhenti pada tahap penyampaian informasi, melainkan mencakup proses evaluasi dan penyesuaian strategi komunikasi yang mencerminkan berkembangnya pola komunikasi pemerintah yang lebih dialogis dan partisipatif di era digital.

Penelitian mengenai komunikasi dialogis pemerintah menunjukkan bahwa keterbukaan dan interaksi yang terjadi melalui media sosial memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Nurika *et al*., 2026). Audiens tidak lagi diposisikan sebagai penerima pesan yang pasif dalam konteks penelitian ini, tetapi diposisikan sebagai aktor yang turut memengaruhi proses komunikasi melalui umpan balik yang diberikan. Interaksi dua arah memungkinkan Kementerian Pertahanan untuk mengidentifikasi isu yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, mengevaluasi efektivitas pesan yang disampaikan, serta mendeteksi narasi yang berpotensi berkembang menjadi misinformasi atau disinformasi. Oleh karena itu, partisipasi publik tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan legitimasi institusi, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan informasi yang lebih resilien dan memperkuat ketahanan informasi nasional.

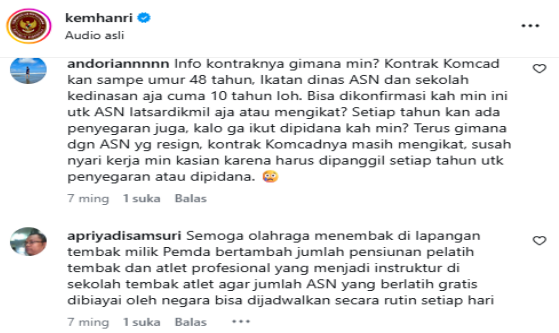

Sumber: (Instagram Kemhanri, 2026)

Gambar 2. Kritik dan Saran Masyarakat di Kolom Komentar

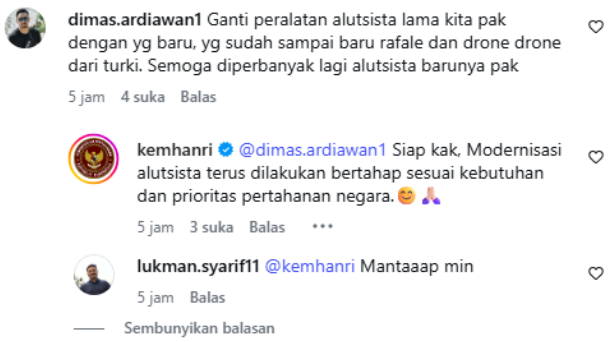

Sumber: (Instagram Kemhanri, 2026)

Gambar 3. Interaksi Masyarakat pada Kolom Komentar Instagram @kemhanri

Interaksi yang terjadi pada kolom komentar tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *social listening* yang memungkinkan institusi memperoleh gambaran mengenai persepsi publik terhadap isu-isu di lingkup pertahanan. Informasi yang muncul melalui komentar, pertanyaan, maupun kritik masyarakat dapat menjadi sumber data yang penting bagi institusi dalam mengevaluasi efektivitas komunikasi yang telah dilakukan. Kemampuan organisasi untuk mendengarkan audiens dalam konteks *Strategic Communication* merupakan bagian penting dari proses komunikasi yang berkelanjutan (Priyono *et al.*, 2025). Komunikasi tidak lagi dipandang sebagai proses penyampaian pesan satu arah, melainkan sebagai proses pertukaran informasi yang memungkinkan terjadinya penyesuaian strategi berdasarkan respons audiens.

Di sisi lain, interaksi yang terjadi melalui media sosial juga berkontribusi terhadap pembentukan pengetahuan publik mengenai sektor pertahanan. Bagi sebagian masyarakat, akun media sosial institusi pemerintah menjadi salah satu sumber informasi utama yang digunakan untuk memahami tugas, fungsi, dan kebijakan yang dijalankan oleh lembaga negara. Paparan informasi yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai isu pertahanan yang sebelumnya cenderung dianggap eksklusif atau hanya dipahami oleh kelompok tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi publik memiliki fungsi edukatif yang turut mendukung peningkatan literasi masyarakat terhadap isu-isu pertahanan dan keamanan nasional.

Implikasi yang lebih luas dari praktik komunikasi tersebut terlihat pada kontribusinya terhadap penguatan ketahanan nasional di era digital. Ketahanan nasional tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer dan pertahanan fisik, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam menjaga stabilitas informasi, membangun kepercayaan publik, dan menghadapi ancaman nonmiliter seperti disinformasi, manipulasi opini, serta perang informasi (Al-anshori

et al., 2026). Melalui penyediaan informasi yang kredibel, pengelolaan isu sensitif, dan keterlibatan publik dalam komunikasi dua arah, Kementerian Pertahanan berupaya menciptakan lingkungan informasi yang lebih resilien terhadap berbagai bentuk gangguan informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi publik melalui Instagram @kemhanri tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mendukung ketahanan informasi nasional dan pada akhirnya berkontribusi terhadap penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh.

Temuan lain yang muncul dalam penelitian ini adalah adanya tantangan dalam menyampaikan isu pertahanan yang kompleks kepada masyarakat yang memiliki tingkat literasi informasi yang beragam. Karakteristik media sosial yang menuntut penyampaian informasi secara cepat, singkat, dan menarik sering kali berhadapan dengan kebutuhan institusi untuk menjaga akurasi informasi dan substansi pesan. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi publik pada sektor pertahanan tidak hanya berkaitan dengan penyebaran informasi, tetapi juga dengan kemampuan institusi dalam mengelola risiko komunikasi di ruang digital.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan, tetapi juga dari kemampuan institusi dalam memastikan bahwa informasi dipahami secara tepat oleh publik. Oleh karena itu, kemampuan menyederhanakan informasi tanpa mengurangi substansi serta menentukan batas keterbukaan informasi menjadi aspek penting dalam komunikasi publik pemerintah di bidang pertahanan. Konsekuensi yang lebih luas adalah keberhasilan komunikasi publik turut berkontribusi terhadap penguatan ketahanan informasi nasional melalui peningkatan pemahaman publik, pengurangan risiko disinformasi, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Tabel 1 Sintesis Temuan Penelitian berdasarkan Teori *Strategic Communication*

Temuan Penelitian	**Konsep *Strategic Communication***	**Indikator dalam Instagram @kemhanri**	**Kontribusi teoritis**
Keterbukaan informasi selektif	*Strategic message management*	Seleksi informasi sebelum dipublikasi.	Memperluas konsep komunikasi strategis pada sektor pertahanan.
Penyederhanaan pesan	*Audience-centered communication*	Bahasa sederhana dan visualisasi konten.	Menunjukkan pentingnya adaptasi pesan pada isu pertahanan.
Pengelolaan isu	*Risk*	Pembatasan	Menjelaskan

sensitif	*communication*	informasi strategis negara.	hubungan komunikasi dan keamanan informasi.
Interaksi publik	*Two-way communication*	Komentar, kritik, dan saran masyarakat.	Memperkuat komunikasi dialogis pemerintah.
Ketahanan informasi nasional	*Information resilience*	Penyediaan informasi resmi dan terverifikasi.	Menghubungkan komunikasi strategis dengan ketahanan nasional.

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi literatur (2026).

Tabel diatas menunjukkan sintesis antara temuan penelitian dengan konsep-konsep utama dalam teori *Strategic Communication*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik komunikasi publik Kementerian Pertahanan melalui Instagram @kemhanri tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan institusi sekaligus menjaga kepentingan keamanan nasional. Keterbukaan informasi yang dilakukan secara selektif mencerminkan praktik *strategic message management*, yaitu pengelolaan pesan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi publik tanpa mengabaikan perlindungan terhadap informasi yang bersifat strategis.

Selain itu, penyederhanaan bahasa dan penggunaan format visual menunjukkan penerapan *audience-centered communication* yang berorientasi pada karakteristik dan kebutuhan audiens digital. Pengelolaan isu sensitif melalui pembatasan informasi tertentu juga memperlihatkan adanya penerapan *risk communication* dalam upaya meminimalkan risiko misinformasi, disinformasi, dan penyalahgunaan informasi yang dapat berdampak pada kepentingan pertahanan negara. Sementara itu, interaksi publik yang terjadi melalui kolom komentar Instagram menunjukkan berkembangnya praktik komunikasi dua arah yang memungkinkan institusi memperoleh umpan balik untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi komunikasi yang dijalankan (Fadilla et al., 2025).

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperluas pemahaman mengenai implementasi *Strategic Communication* pada sektor pertahanan dengan menunjukkan bahwa komunikasi publik, pengelolaan keamanan informasi, dan penguatan ketahanan informasi nasional merupakan elemen yang saling berkaitan dalam mendukung legitimasi institusi dan stabilitas informasi di ruang digital.

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengelolaan persepsi, pembangunan legitimasi, dan mitigasi risiko informasi di ruang digital. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan komunikasi pada sektor pertahanan memiliki karakteristik yang berbeda

dibandingkan sektor publik lainnya karena harus menyeimbangkan tuntutan transparansi dengan kebutuhan menjaga keamanan nasional.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa implementasi *Strategic Communication* pada sektor pertahanan tidak dapat dijelaskan hanya melalui aspek penyampaian pesan kepada audiens. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi didahului oleh mekanisme seleksi informasi, koordinasi organisasi, dan pertimbangan keamanan yang memengaruhi bentuk akhir pesan yang dipublikasikan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi strategis pada institusi yang mengelola informasi sensitif memiliki dimensi tata kelola informasi yang lebih kuat dibandingkan organisasi publik pada umumnya.

Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai *Strategic Communication* dengan menempatkan proses pengelolaan informasi sebagai bagian integral dari strategi komunikasi organisasi. Perspektif tersebut memberikan kontribusi konseptual bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh hubungan antara pesan dan audiens, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dalam mengelola proses produksi informasi sebelum pesan disampaikan kepada publik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik komunikasi publik Kementerian Pertahanan melalui Instagram @kemhanri menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di sektor pertahanan dilaksanakan secara selektif dan terkendali dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan nasional. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat merupakan informasi yang telah melalui proses pertimbangan institusional sehingga mampu memenuhi kebutuhan informasi publik tanpa mengabaikan perlindungan terhadap informasi strategis negara. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi pada sektor pertahanan tidak dimaknai sebagai transparansi secara penuh, melainkan sebagai bentuk keterbukaan yang disesuaikan dengan karakteristik dan tanggung jawab institusi pertahanan dalam menjaga keamanan nasional.

Pengelolaan pesan pertahanan melalui Instagram @kemhanri juga dilakukan melalui penyederhanaan bahasa, pemanfaatan format visual, serta penyesuaian konten berdasarkan karakteristik audiens media sosial. Strategi tersebut memungkinkan informasi pertahanan yang kompleks dan bersifat teknis menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat yang memiliki tingkat literasi informasi yang beragam. Selain itu, pemanfaatan fitur-fitur Instagram juga mendukung penyampaian pesan yang lebih interaktif dan partisipatif sehingga komunikasi

publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai media untuk membangun pemahaman dan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan isu sensitif dan keamanan informasi merupakan bagian penting dari komunikasi strategis pertahanan. Kementerian Pertahanan menerapkan pembatasan terhadap informasi tertentu yang berkaitan dengan kepentingan strategis negara untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang berpotensi mengancam pertahanan dan keamanan nasional. Praktik tersebut menunjukkan bahwa komunikasi publik pada sektor pertahanan tidak hanya berorientasi pada keterbukaan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko informasi dalam menghadapi ancaman misinformasi, disinformasi, dan manipulasi opini publik di ruang digital.

Selain itu, interaksi publik melalui kolom komentar Instagram dimanfaatkan sebagai sumber evaluasi dalam penyusunan strategi komunikasi selanjutnya. Respons masyarakat menjadi indikator penting untuk memahami kebutuhan informasi, persepsi, serta tingkat pemahaman publik terhadap isu pertahanan. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi publik Kementerian Pertahanan telah mengarah pada pola komunikasi yang lebih dialogis dan partisipatif. Penyediaan informasi yang kredibel, pengelolaan isu sensitif, dan keterlibatan publik dalam praktik komunikasi publik melalui Instagram @kemhanri berkontribusi terhadap penguatan ketahanan informasi nasional sebagai salah satu aspek penting dalam ketahanan nasional di era digital.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak dimaknai sebagai penyediaan akses informasi secara penuh kepada publik, melainkan sebagai upaya penyampaian informasi yang tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat akan informasi dan kepentingan negara dalam menjaga keamanan nasional. Kementerian Pertahanan berupaya untuk menerapkan prinsip keterbukaan yang terkendali melalui proses seleksi, pengemasan, dan penyampaian informasi yang disesuaikan dengan tingkat sensitivitas informasi yang dimiliki. Praktik tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan keamanan informasi bukan merupakan dua hal yang saling bertentangan, tetapi dapat dikelola secara bersamaan melalui strategi komunikasi yang tepat. Hal ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas komunikasi publik di era digital tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang dipublikasikan, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipahami secara tepat oleh masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *Strategic Communication* dalam konteks komunikasi di bidang pertahanan dan keterbukaan

informasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan komunikasi strategis pada institusi pertahanan tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan komunikasi organisasi, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan risiko informasi dan perlindungan terhadap kepentingan strategis negara. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai implementasi *Strategic Communication* pada sektor yang memiliki tingkat sensitivitas informasi yang tinggi dan memperlihatkan bahwa komunikasi strategis dapat menjadi suatu mekanisme untuk menyeimbangkan tuntutan transparansi dengan kebutuhan keamanan informasi.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga pemerintah lainnya yang mengelola informasi strategis dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Pengalaman Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dapat dilakukan tanpa mengabaikan aspek keamanan informasi apabila didukung oleh proses pengelolaan pesan yang terencana, mekanisme seleksi informasi yang jelas, dan pemahaman terhadap karakteristik audiens digital. Oleh karena itu, penguatan kapasitas komunikasi digital, peningkatan literasi informasi, serta pengembangan strategi komunikasi yang adaptif terhadap dinamika ruang digital menjadi aspek penting yang perlu terus dikembangkan oleh institusi pemerintah dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di masa mendatang.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan media sosial pada sektor pertahanan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi komunikasi, tetapi juga mencerminkan perubahan pola pengelolaan informasi dalam organisasi pemerintah. Kehadiran platform digital mendorong institusi untuk menyesuaikan prosedur kerja, mekanisme koordinasi, serta proses produksi informasi agar mampu merespons kebutuhan komunikasi yang berkembang secara cepat. Efektivitas komunikasi publik dalam konteks tersebut, tidak hanya ditentukan oleh kualitas pesan yang dipublikasikan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan berbagai fungsi yang terlibat dalam pengelolaan informasi. Proses verifikasi, koordinasi antarunit, penyusunan konten, hingga evaluasi respons audiens menjadi bagian yang saling berkaitan dalam mendukung keberlangsungan komunikasi publik yang efektif.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran institusional yang memungkinkan organisasi memperoleh masukan secara berkelanjutan dari lingkungan eksternal. Respons masyarakat, pertanyaan yang berulang, maupun isu yang banyak memperoleh perhatian publik dapat menjadi sumber informasi yang berguna dalam penyempurnaan strategi komunikasi pada masa mendatang. Dengan demikian,

komunikasi publik melalui media sosial tidak hanya menghasilkan distribusi informasi kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan proses adaptasi organisasi yang membantu institusi memahami perubahan kebutuhan informasi publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan komunikasi digital pada sektor pertahanan memerlukan kapasitas organisasi yang mampu belajar, beradaptasi, dan melakukan penyesuaian secara berkelanjutan terhadap dinamika ruang komunikasi digital yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik komunikasi publik Kementerian Pertahanan melalui Instagram @kemhanri mencerminkan upaya institusi dalam menyesuaikan tuntutan keterbukaan informasi dengan karakteristik sektor pertahanan yang memerlukan pengelolaan informasi secara hati-hati. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan dua informan yang berasal dari lingkungan internal Kementerian Pertahanan sehingga perspektif yang diperoleh masih didominasi oleh sudut pandang institusi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan informan dari berbagai kelompok pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai audiens komunikasi publik, serta melakukan perbandingan dengan platform media sosial pemerintah lainnya agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik komunikasi strategis pertahanan di era digital.

Daftar Pustaka

Aisy, N. R., & Christin, M. (2025). Habitually posting : motivasi penggunaan media sosial saat berolahraga. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut*, *11*(1), 193–208. https://doi.org/10.52434/jk.v11i1.41492

Al-anshori, M. H. S., Setiawan, B., Wahyudi, B., Setiawibawa, R., & Uksan, A. (2026). Tren Penelitian tentang Disinformasi dalam Konflik Rusia – Ukraina 2022 – 2025 : Analisis Bibliometrik. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, *5*(3), 1181–1194. https://doi.org/10.56799/j-ceki.v5i3.15372

Ash-shiddiqi, H., Sinaga, R. W., & Audina, N. C. (2025). Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Edukatif*, *3*(2), 333–343. https://doi.org/10.65311/je.v3i2.1628

Damiana. (2025). Analisis Efektifitas Media Sosial Instagram sebagai Sarana Promosi pada Kantor Pos Indonesia Cabang Sintang. *FOKUS (Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang)*, *23*(2), 489–503. https://doi.org/10.51826/fokus.v23i2.1650

Estaswara, H. (2021). Strategic Communication dalam Perspektif Ilmu Komunikasi. *Jurnal Coverage*, *11*(2), 77–87. https://doi.org/10.35814/coverage.v11i2.2028

Fadilla, R. Z., Hadiyanto, & Firdaus, D. (2025). Pengelolaan Akun Instagram @ diskominfobdg sebagai Media Penyuluhan Informasi. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut*, *11*(2), 484–501. https://doi.org/10.52434/jk.v11i2.42472

Faraby, A. H. Al. (2024). Perkembangan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) di Indonesia (Suatu Kajian dari Peran Penyidik Kepolisian dalam Menangani Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE)). *Meraja Journal*, *7*(1), 48–61. https://doi.org/10.33080/mrj.v7i1.331

Fatima, S., & Sa'i, M. (2025). Strategi Komunikasi dengan Pendekatan Audience-Centered dalam Meningkatkan Efektivitas Pesan pada Sharing Session Bingkis Ramadhan di Pamekasan , Madura. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(4), 1215–1228. https://doi.org/10.63822/bmx7ba23

Habibie, R. A., Ahmad, Wahyudi, D., Aditya, M., Hobiri, M., & Syahbintang, M. (2025). Tantangan KPU di Era Digital : Antara Transparansi dan Keamanan Data di Kota Palangka Raya. *Kajian Ilmu Hukum Sosial Dan Administrasi Negara*, *2*(4), 61–70. https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i4.2683

Hariadi, J., Sazali, H., & Amelia, N. (2025). Islam , Budaya , dan Komunikasi Publik : Sinergi Pemimpin Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity*, *7*(1), 116–126. https://doi.org/10.37364/jireh.v7i1.390

Harsandy, A. H. (2025). Analisis Ancaman Hibrida terhadap Keamanan Maritim Indonesia dan Implikasi pada Postur TNI Angkatan Laut. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *6*(2), 1137–1143. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.6743

Miliani, A., Pramudita, S., Rosanti, Febriyanti, G., & Kartika. (2025). Corporate communication Sebagai Strategi Utama dalam Pengelolaan Citra Organisasi. *Journal of Sociology Research and Education*, *1*(6), 250–258. https://doi.org/10.64924/wr7v6j58

Nurika, S. P., Aiyanti, N. Y., Utaridah, N., Kartika, T., & Putra, P. (2026). Membangun Citra Pemerintah melalui Media Sosial : Strategi Komunikasi Pemprov Lampung di Era Digital. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, *10*(1), 203–213. https://doi.org/10.35870/jtik.v10i1.4834

Prasetyo, H. B. (2024). Upaya Membangun Ruang Pertahanan pada Ruang Pikir Individu dan Ruang Pikir Kolektif Masyarakat Indonesia dalam Mengatasi Dampak Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(11), 12500–12510. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i11.6039

Priyono, B., Rizki, M., Suparno, & Saparuddin. (2025). Strategi Pengambilan Keputusan Melalui Komunikasi Efektif Pada Organisasi Publik. *Jurnal Good Governance*, *21*(2). https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1372

Ricky, & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas , Transparansi dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *12*(2), 62–75. https://doi.org/https://10.33701/jiwbp.v12i2.2911

Saputro, D. S., & Satriya, B. (2023). Penerapan Asas Keterbukaan Informasi Publik pada Institusi Tentara Nasional Indonesia dikaitkan dengan Data Kerahasiaan Negara. *Merdeka Law Journal*, *4*(2), 101–111. https://doi.org/10.26905/mlj.v4i2.11529

Sarjito, A. (2024). Hoaks , Disinformasi , dan Ketahanan Nasional : Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics*, *6*(2), 175–186. https://doi.org/10.47650/jglp.v6i2.1547

Umma, W. P., & Ahmad, N. (2025). Peran Media Sosial sebagai Medium untuk Memaksimalkan Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Jombang. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, *7*(1), 122–135. https://doi.org/https://10.33366/jkn.v%vi%i.2403

Wibowo, I. A., Syam, B. M., & Purwoko, A. A. (2023). Pengaruh Kompetensi dan Komunikasi Sosial Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Darat. *Jurnal Teknik Sipil Pertahanan*, *10*(1), 60–73. https://ojs.akmil.ac.id/index.php/tekniksipilpertahanan/article/view/41

Zordi, D. A., Ihsan, M. S., Nazarudin, M. A., & Patrianti, T. (2026). Peran Media Sosial dalam Pembentukan Opini Publik dan Dinamika Kebijakan Pemerintah di Era Digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, *3*(1). https://doi.org/10.62383/komunikasi.v3i1.882